



PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU UTARA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE 2025 - 2026

Sekretariat Daerah

Provinsi Maluku Utara

**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERIODE 2025-2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho-Nya sehingga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun dalam rangka melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota yang memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2026.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara 2025-2026 merupakan pengganti dokumen jangka menengah transisi yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RPD memperhatikan beberapa hal penting antara lain : Penyelarasan target dan indikator makro dan program prioritas RPJMN Tahun 2020-2024; hasil evaluasi kinerja daerah RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024; isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah yang sudah dispesifikasikan dan disepakati dalam kinerja pelayanan Pemerintah Daerah RPD, serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan sembilan (9) biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berpedoman pada RPD Provinsi Maluku Utara 2025-2026, juga berpedoman pada penentuan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi RPJPD 2025-2045 yang telah diselaraskan dengan RPJMN 2025-2045, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang



berlaku. Melalui dokumen ini diharapkan pada masa transisi ini, rencana strategis pembangunan tetap terus dilaksanakan dalam rangka kesinambungan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Kami berharap dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 dapat menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan kebijakannya secara konsisten, sinergis, efisien dan efektif, serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan yang baik dan bersih.

Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tahapan penyusunan dokumen. Disadari juga bahwa penyusunan dokumen ini jauh dari sempurna, sehingga memerlukan kritik dan masukan dalam rangka mengarah. Harapan kami dapat memberikan manfaat dalam penguatan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, 8 Oktober 2024



DAFTAR ISI

COVER.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi	10
2.1.2 Kedudukan dan Struktur Organisasi	18
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	23
2.2.2 Sarana dan Prasarana	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Permasalahan Perangkat Daerah	41
3.2 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1 Strategi Arah Kebijakan Sekretariat Daerah.....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	86
BAB VIII PENUTUP	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sturktur Organisasi	19
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	19
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat	20
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Biro Hukum	20
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Biro Perekonomian	20
Gambar 2.6 Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa.....	21
Gambar 2.7 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan..	21
Gambar 2.8 Struktur Organisasi Biro Organisasi	22
Gambar 2.9 Struktur Organisasi Biro Umum	22
Gambar 2.9 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan	23



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sekretariat Daerah	23
Tabel 2.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon...	24
Tabel 2.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.6 Komposisi Jasa Pelayanan Umum (Non PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	25
Tabel 2.7 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi	25
Tabel 2.8 Daftar Inventaris Sekretariat Daerah.....	27
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	52
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	54
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Perencanaan menekankan pentingnya mengidentifikasi tujuan dan strategi yang tepat, ataupun menekankan pentingnya mengalokasikan sumber daya secara efektif maupun menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi.

Perencanaan merupakan alat untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Dengan merencanakan secara cermat, kita dapat memperkirakan kemungkinan masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Perencanaan adalah cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, yang memungkinkan kita untuk mengatur sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga dengan lebih efektif, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih cepat dan efisien. Membuat keputusan dan memilih antara berbagai opsi yang tersedia. Mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, manfaat, dan risiko untuk setiap opsi yang ada, dan memilih opsi yang tepat.

Kemudian perencanaan memerlukan data dan informasi yang akurat dan terkini yang artinya persuasif. Persuasif pada hal ini adalah proses mengembangkan strategi untuk meyakinkan orang lain untuk mengikuti pandangan, ide, atau tindakan tertentu. Ini termasuk menentukan audiens yang akan disasar, mengembangkan argumen yang kuat dan kredibel, dan memilih media yang tepat



untuk menyampaikan pesan persuasif tersebut. Perencanaan harus mempertimbangkan kondisi dan situasi yang ada saat ini dan di masa yang akan datang yang artinya mementingkan keberlanjutan. Perencanaan proses berkelanjutan adalah proses mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa suatu proses atau kegiatan berjalan secara efektif dan efisien dalam jangka panjang. Ini termasuk menentukan tujuan dan sasaran dari proses tersebut, mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memastikan bahwa proses tersebut dapat diukur dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan.

Perencanaan proses berkelanjutan juga memerlukan pengelolaan yang efektif untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, serta memastikan bahwa ada mekanisme untuk menangani masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proses tersebut. Perencanaan proses berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki secara berkelanjutan suatu proses agar dapat terus menghasilkan hasil yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi secara terus-menerus kelemahan dalam suatu proses, lalu mengimplementasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan harus dapat diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk dapat melakukan pengukuran dan evaluasi, maka dibutuhkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses menentukan pilihan terbaik di antara beberapa alternatif yang tersedia. Ini sering diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keputusan pribadi maupun dalam organisasi. Pengambilan keputusan dapat menjadi sulit karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti data dan informasi yang tersedia, preferensi pribadi, dan dampak potensial dari setiap pilihan. Untuk membantu mengambil keputusan, banyak orang menggunakan metode yang telah terbukti efektif, seperti analisis SWOT, matriks



keputusan, atau teknik pemilihan multi-kriteria. Yang penting adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan, dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

Banyak persoalan yang muncul ditengah-tengah euforia otonomi daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan di daerah terjadi ketimpangan pembangunan dari satu wilayah dan wilayah yang lain sehingga pemerintahan pada tingkat tertentu merasa diabaikan, namun sesungguhnya pelaksanaan pembangunan telah direncanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam dokumen perencanaan itu sendiri.

Untuk menghindari ketimpangan yang terjadi sudah tentu perlu dilakukan pengkajian dan analisa yang matang terhadap pengalokasian pembangunan dalam satu wilayah tertentu untuk menghindari terjadi over program dalam satu wilayah sedangkan wilayah yang lain mengalami krisis program.

Perencanaan strategis merupakan jenis perencanaan yang mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan organisasi untuk menentukan arah yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategis merupakan pedoman awal dalam menetapkan sasaran pembangunan per-tahun, program-program yang perlu untuk mencapai sasaran, besarnya biaya yang diperlukan, *output* dan *outcome* yang diharapkan, dan termasuk perlunya dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah yang dibiayai masyarakat dari pajak dalam melakukan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang periode 2025-2026 merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 / Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026. Konsep perencanaan yang dituangkan dalam Renstra merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan kerja sebagai upaya untuk



mendorong kinerja bagi pimpinan maupun staf dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan untuk dapat melahirkan target yang hendak dicapai dalam tujuan Pembangunan, selain itu seluruh program ini kemudian akan dievaluasi untuk perbaikan kedepan.

Adapun hakekat dan manfaat Rencana Strategik Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berkedudukan dan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Rencana Strategik Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan penjabaran tersrtuktur dan sistematis dari Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Menguraikan daftar program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan dalam rentang periode satu tahun melalui sumber pembiayaan APBD Provinsi Maluku Utara;
3. Merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Startegik, Pelaksanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum dari penyusunan Rencana Strategis Periode 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 581, 2020);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419, 2021);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun



2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

28. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Provinsi Maluku Utara adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan agar dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dapat pula dijadikan ukuran untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Sekretariat Provinsi Maluku Utara ini juga bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk menjadi acuan bagi Biro untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
4. Menyediakan dokumen perencanaan yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran evaluasi kinerja;
5. Sebagai bagian dari pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2026 terdiri dari :



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
4. Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah;
2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah;
2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini paling sedikit memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah pada Bab III Tugas Pokok dan Fungsi.

Bagian Kesatu Tugas Pokok, Pasal 4 berbunyi Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Kedua Fungsi, Pasal 5 berbunyi Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. Pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dijelaskan lebih rinci pada Bab IV tentang Rincian Tugas Jabatan Bagian Kesatu Sekretaris Daerah Pasal 6 :

1. Ayat (1) : Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
2. Ayat (2) : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;



-
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Ayat (3) : Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan perumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi;
 - b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Gubernur;
 - c. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
 - d. Mengkoordinasikan dan menugaskan para Asisten, Kepala Biro dan Kepala Perangkat Daerah lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - e. Merumuskan dan merencanakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Merumuskan dan merencanakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Mengendalikan dan membina Aparatur Perangkat Daerah;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - i. Menandatangani surat-surat yang didelegasikan oleh Gubernur;
 - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Bagian Kedua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 7 :

1. Ayat (1) : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi



-
- daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum
2. Ayat (2) : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Ayat (3) Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. membantu sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan HAM, dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Membantu mengkoordinasikan perumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi;
 - c. Membantu mengkoordinasikan perumusan kebijakan Gubernur;
 - d. Membantu merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;



-
- e. Membantu penyusunan rencana dan program kerja bidang pemerintahan, hukum dan HAM, dan kesejahteraan rakyat;
 - f. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - g. Membawahi dan mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum dengan ruang lingkup meliputi bidang otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pengawasan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, ketenagakerjaan, kerjasama dan perbatasan, kesatuan bangsa dan politik, transmigrasi, hukum dan perundangundangan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, keagamaan, pemerintahan desa/kelurahan, pertambangan dan energi;
 - h. Memberi petunjuk kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Hukum, untuk mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - i. Menilai prestasi kerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Hukum serta bawahannya;
 - j. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, hukum;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- Pasal 8 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan



3. Biro Hukum.

Bagian Ketiga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 60 :

1. Ayat (1) : Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, Pengadaan Barang/Jasa serta administrasi pembangunan.
2. Ayat (2) : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, Pengadaan Barang/Jasa dan administrasi pembangunan;
 - c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ayat (3) : Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Membantu sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, barang jasa dan administrasi pembangunan;
 - b. Membantu mengkoordinasikan perumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi;



-
- c. Membantu mengkoordinasikan perumusan kebijakan Gubernur;
 - d. Membantu merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
 - e. Membantu penyusunan rencana dan program kerja bidang perekonomian, barang jasa dan administrasi pembangunan;
 - f. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - g. Membawahi dan mengkoordinasikan Biro Perekonomian, Biro Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan dengan ruang lingkup meliputi bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya serta pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan dan layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah;
 - h. Memberi petunjuk kepada Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Barang dan Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, untuk mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - i. Menilai prestasi kerja Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Barang dan Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan serta bawahannya;
 - j. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, barang jasa dan administrasi pembangunan;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 61 : Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

- 1. Biro Perekonomian;
- 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 3. Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Keempat Asisten Administrasi Umum Pasal 110 :



1. Ayat (1) : Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan.
2. Ayat (2) : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan administrasi pimpinan;
 - f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ayat (3) : Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Membantu sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang organisasi, administrasi pimpinan dan administrasi umum;
 - b. Membantu mengkoordinasikan perumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi;
 - c. Membantu mengkoordinasikan perumusan kebijakan Gubernur;
 - d. Membantu merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
 - e. Membantu penyusunan rencana dan program kerja bidang organisasi, administrasi pimpinan dan administrasi umum;



-
- f. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - g. Membawahi dan mengkoordinasikan Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan dengan ruang lingkup meliputi bidang kelembagaan, analisis jabatan, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, tatalaksana, rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha, perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
 - h. Memberi petunjuk kepada Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, untuk mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - i. Menilai prestasi kerja Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan serta bawahannya;
 - j. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris Daerah di bidang organisasi, administrasi pimpinan dan administrasi umum;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 111 : Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Biro Organisasi;
2. Biro Umum; dan
3. Biro Administrasi Pimpinan.

Bagian kelima Staf Ahli Pasal 163 :

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 164 : Staf Ahli Gubernur terdiri dari :

Staf Ahli Gubernur terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;



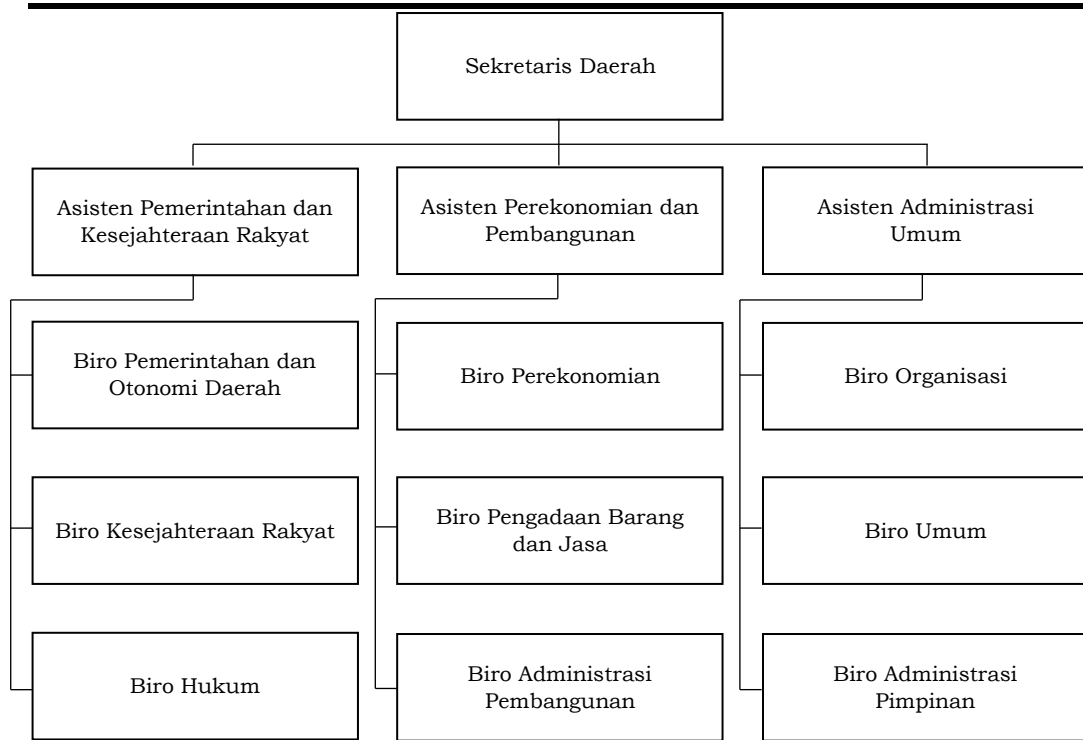
-
2. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 165 :

1. Ayat (1) : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
2. Ayat (2) : Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap ISU-ISU strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
3. Ayat (3) : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur terkait dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

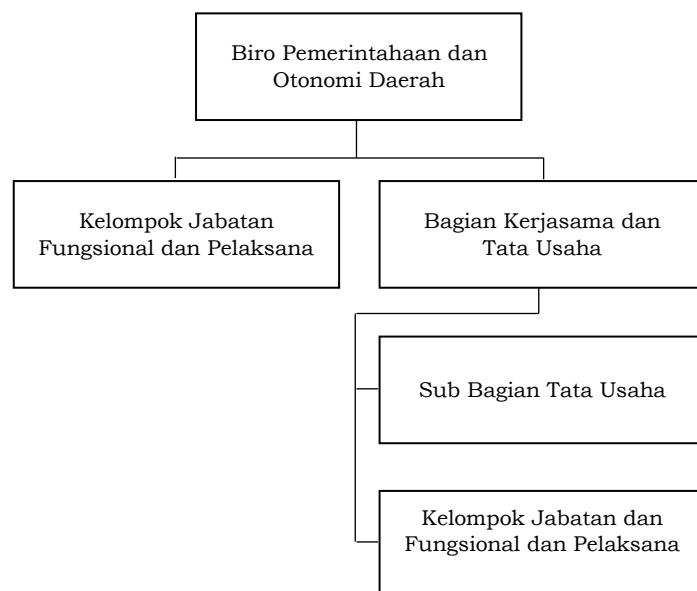
2.1.2 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah pada Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 berbunyi Setda merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sementara itu struktur perangkat daerah dapat digambarkan sebagai berikut ini :



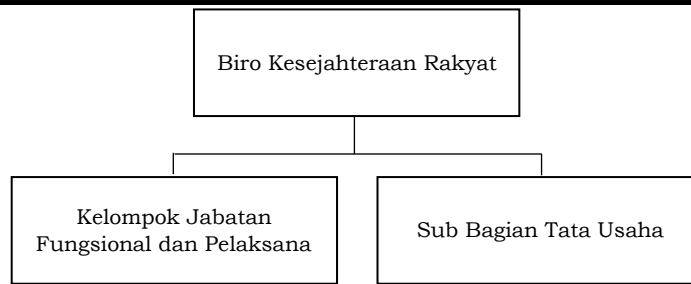
Gambar 2.1 **Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)

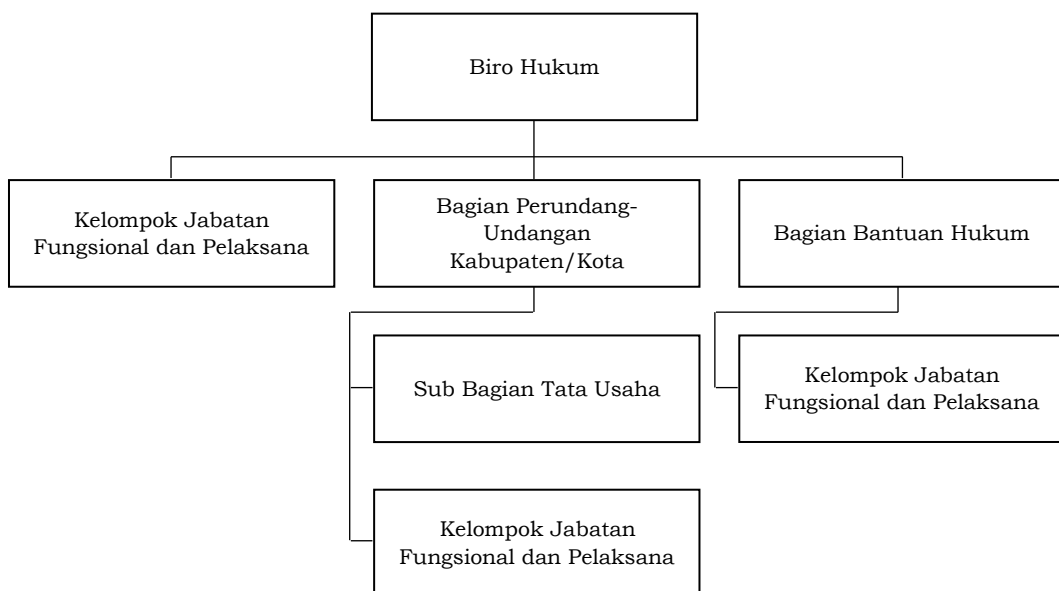


Gambar 2.2 **Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

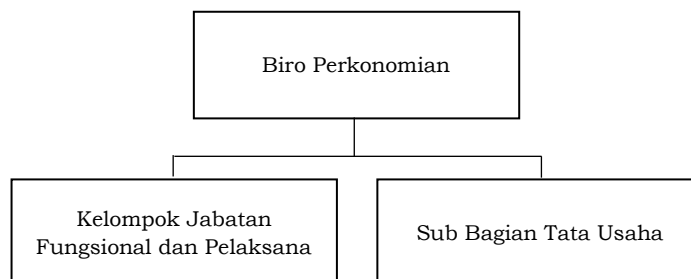
(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)



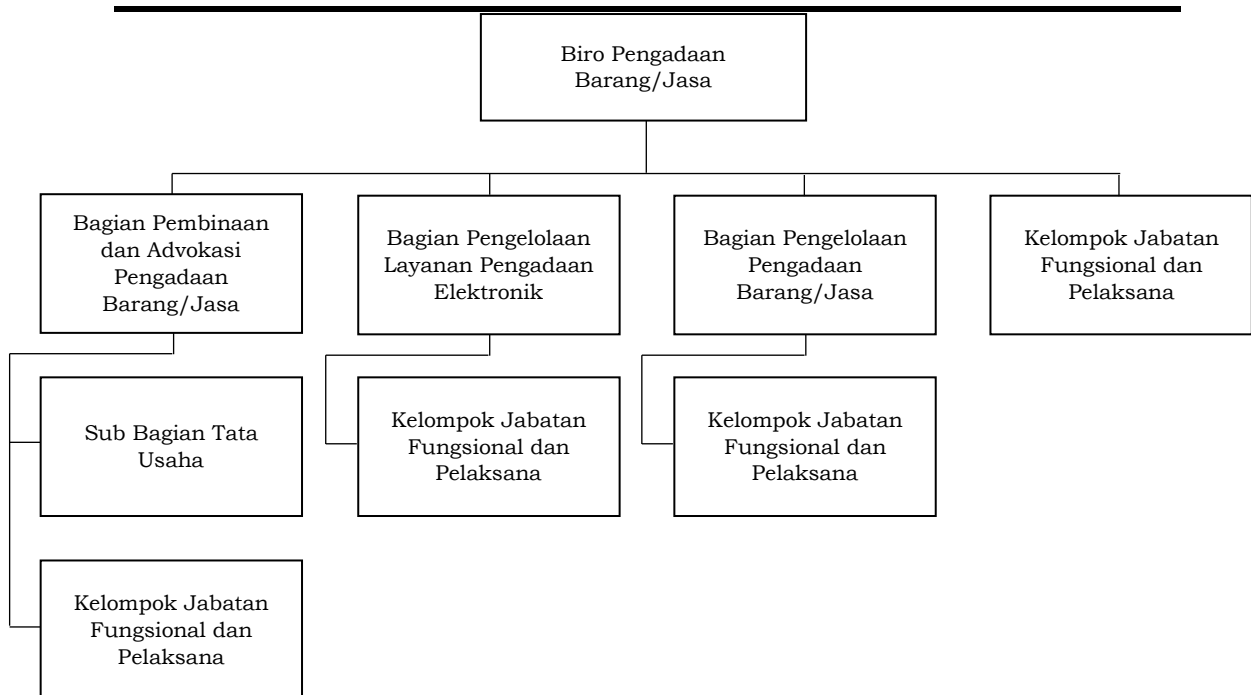
Gambar 2.3 **Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat**
(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)



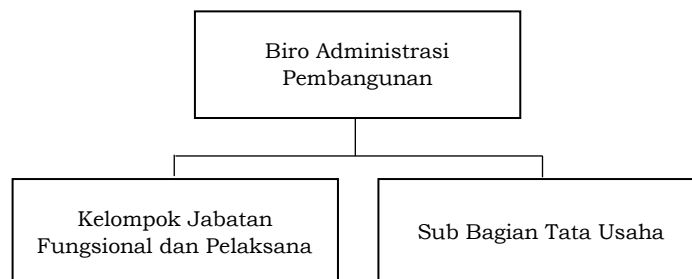
Gambar 2.4 **Struktur Organisasi Biro Hukum**
(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)



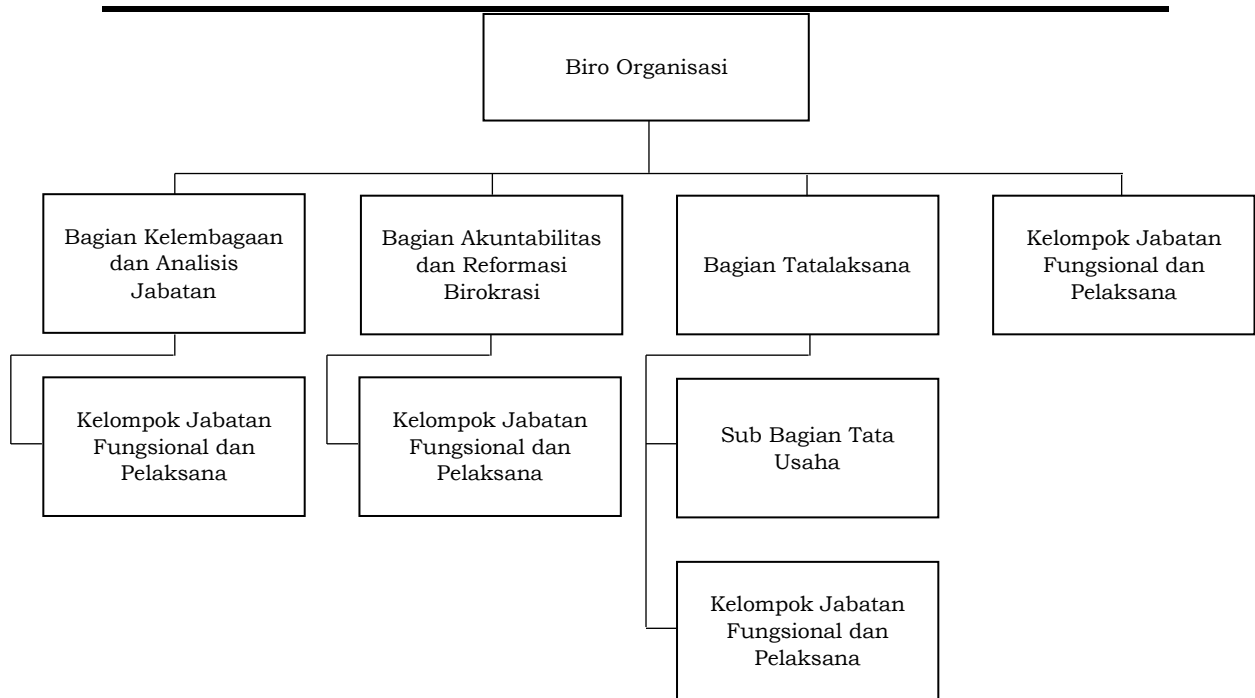
Gambar 2.5 **Struktur Organisasi Biro Perekonomian**
(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)



Gambar 2.6 **Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa**
(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)

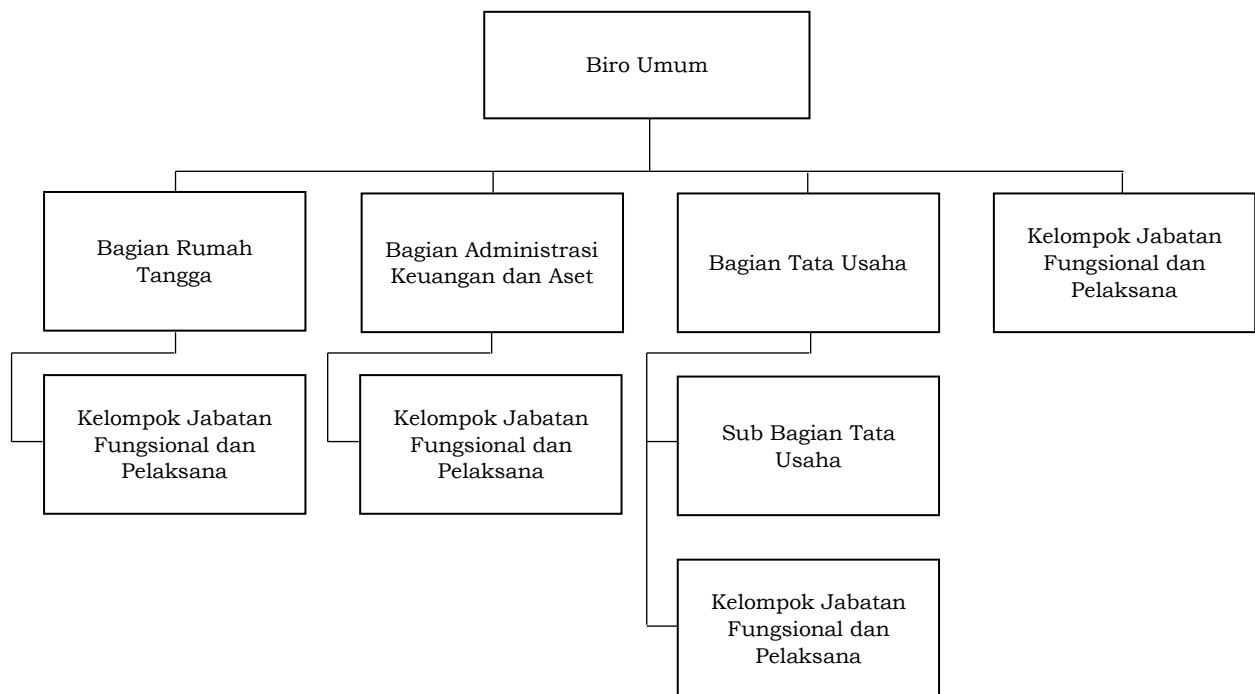


Gambar 2.7 **Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan**
(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)



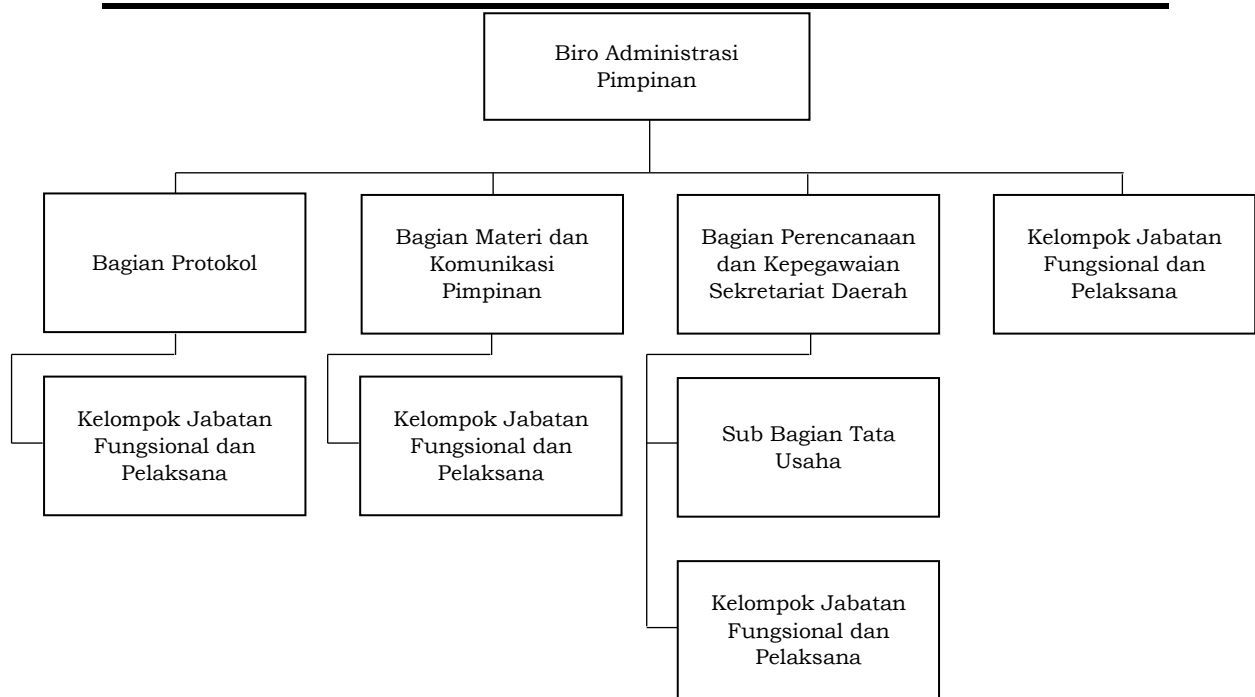
Gambar 2.8 **Struktur Organisasi Biro Organisasi**

(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)



Gambar 2.9 **Struktur Organisasi Biro Umum**

(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)



Gambar 2.9 **Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan**

(Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara didukung oleh sebagai berikut :

1. Kepala Biro;
2. Kepala Bagian;
3. Kepala Sub Bagian atau Jabatan Fungsional yang setara;
4. Staf Pelaksana/Fungsional; dan
5. Non ASN.

Uraian data di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 **Komposisi Sekretariat Daerah**

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 Orang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Orang
Asisten Administrasi Umum	1 Orang
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1 Orang



Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	1 Orang
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1 Orang
Kepala Biro	9 Orang
Kepala Bagian	14 Orang
Kepala Sub Bagian	9 Orang
Staf Pelaksana	266 Orang
Fungsional	81 Orang
PPPK	
PPPK	16 Orang
Total	402 Orang

Tabel 2.2 **Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah
IV	55 Orang
III	286 Orang
II	45 Orang
I	0
Total	386 Orang

Tabel 2.3 **Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon**

Golongan	Jumlah
II	15 Orang
III	14 Orang
IV	9 Orang
Total	38 Orang

Tabel 2.4 **Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**

Golongan	Jumlah
S-3	n/a
S-2	n/a
S-1/DIV	n/a
D-III	n/a
SMA/SLTA/Sederajat	n/a
Total	n/a

Tabel 2.5 **Komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**

Golongan	Jumlah
S-3	n/a
S-2	n/a
S-1/DIV	n/a
D-III	n/a
SMA/SLTA/Sederajat	n/a
Total	n/a



Tabel 2.6 Komposisi Jasa Pelayanan Umum (Non PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Golongan	Jumlah
S-3	n/a
S-2	n/a
S-1/DIV	n/a
D-III	n/a
SMA/SLTA/Sederajat	n/a
Total	n/a

Tabel 2.7 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Non PNS	PPPK	Jumlah
	IV	III	II	I			
Sekretaris Daerah	1						1
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						1
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1						1
Asisten Administrasi Umum	1						1
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1						1
Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	1						1
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1						1
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah							36
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian	1						1
Kepala Sub Bagian		1					1
Staf Pelaksana		19					19
Fungsional	3	6					9
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)							0
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)					5		5
Biro Kesejahteraan Rakyat							38
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian							0
Kepala Sub Bagian	1						1
Staf Pelaksana	1	23	6				30
Fungsional		6					6
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)							0



Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)							0
Biro Hukum							36
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian	2						2
Kepala Sub Bagian		1					1
Staf Pelaksana	3	18	4				25
Fungsional	1	6					7
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)							0
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)					0		0
Biro Perekonomian							29
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian							0
Kepala Sub Bagian		1					1
Staf Pelaksana		15	2				17
Fungsional	3	4					7
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)							0
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)					3		3
Biro Pengadaan Barang/Jasa							58
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian	1	1					2
Kepala Sub Bagian		1					1
Staf Pelaksana	1	19	1				21
Fungsional	3	22					25
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)						8	8
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)							0
Biro Administrasi Pembangunan							34
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian							0
Kepala Sub Bagian	1						1
Staf Pelaksana	2	16	3				21
Fungsional	4	6					10
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)							0
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)							0
Biro Organisasi							37
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian	2	1					3
Kepala Sub Bagian		1					1
Staf Pelaksana		18	4				22
Fungsional		8					8



Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)						2	2
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)							0
Biro Umum							89
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian	1	2					3
Kepala Sub Bagian	1						1
Staf Pelaksana	3	55	21				79
Fungsional		4					4
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)						1	1
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)							0
Biro Administrasi Pimpinan							53
Kepala Biro	1						1
Kepala Bagian	3						3
Kepala Sub Bagian	1						1
Staf Pelaksana	1	27	4				32
Fungsional		5					5
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)						5	5
Jasa Pelayanan Umum (Non PNS)					6		6

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8 :

Tabel 2.8 **Daftar Inventaris Sekretariat Daerah**

No	Nama Barang	Satuan	Tahun	Jumlah	
				Barang	Nilai
Sekretariat					
1	Lemari Kayu	Buah	2020	1	1.250.000
2	Rak Kayu	Buah	2020	1	1.000.000
3	Infocus	Unit	2020	1	7.700.000
4	Infocus	Unit	2020	2	6.700.000
5	Meja Rapat	Unit	2020	20	45.700.000
6	Kursi Putar	Buah	2020	1	2.200.000
7	Mesin Potong Rumput	Unit	2020	1	1.980.000



Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
Periode 2025-2026

8	Lemari Es	Unit	2020	1	1.750.000
9	AC Window	Unit	2020	4	36.320.000
10	AC Split	Unit	2020	7	23.835.000
11	AC Split	Unit	2020	1	3.064.500
12	AC Split	Unit	2020	2	6.400.000
13	AC Split	Unit	2020	1	4.600.000
14	AC Split	Unit	2020	2	7.400.000
11	Rice Warmer	Unit	2020	1	700.000
12	Alat Daput Lainnya	Set	2020	1	3.890.830
13	Televisi	Unit	2020	2	9.200.000
14	Sound System	Set	2020	1	26.249.500
15	Microphone	Unit	2020	1	6.800.000
16	Layar Film / Projector	Unit	2020	1	2.400.000
17	Handy Talky	Unit	2020	8	7.680.000
18	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Unit	2020	2	7.884.500
19	Laptop	Unit	2020	1	12.100.000
20	Laptop	Unit	2020	1	14.000.000
21	Tablet PC	Unit	2020	1	32.706.000
22	Printer	Unit	2020	1	5.450.000
23	Printer	Unit	2020	1	2.800.000
24	Printer	Unit	2020	1	4.319.000
25	Kabel UTP	Unit	2020	1	1.335.000
26	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	120.000
27	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	120.000
28	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	72.000
29	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	144.000
30	Alat Dapur Lainnya	Lusin	2020	1	142.000
31	Alat Dapur Lainnya	Pak	2020	1	1.380.000
32	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	288.000
33	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	510.000
34	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	600.000
35	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	150.000
36	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	119.800
37	Alat Dapur Lainnya	Set	2020	1	300.000
38	Tripod Camera	Unit	2020	3	1.950.000
39	Alat Studio Film Lainnya	Unit	2020	1	840.000
40	Conector	Unit	2020	1	330.000
41	Printer	Unit	2020	2	1.100.000
42	Lemari Kayu	Buah	2021	1	2.850.000



Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
Periode 2025-2026

43	Meja Kerja Kayu	Set	2021	1	7.500.000
44	Meja Bundar	Buah	2021	10	40.000.000
45	Meja ½ Biro (Lokal)	Buah	2021	1	1.550.000
46	Meja ½ Biro (Sigma)	Buah	2021	4	3.400.000
47	Kursi Putar	Buah	2021	4	3.000.000
48	Kursi Biasa	Buah	2021	50	30.000.000
49	Sofa	Set	2021	1	14.750.000
50	Mesin Cuci	Unit	2021	1	5.500.000
51	Lemari Es	Unit	2021	1	12.000.000
52	AC Split	Unit	2021	1	3.550.000
53	Dispenser	Unit	2021	1	1.500.000
54	Meja Kerja Pejabat Eselon I / Gubernur / Wakil Gubernur / Wakil Bupati / Wakil Walikota	Set	2021	1	9.000.000
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon I / Gubernur / Wakil Gubernur / Wakil Bupati / Wakil Walikota	Buah	2021	1	1.800.000
56	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Buah	2021	1	1.100.000
57	Camera Digital	Unit	2021	1	19.348.000
58	Printer	Unit	2021	1	1.150.000
59	Water Treatment (Mesin Proses Apung)	Unit	2022	2	679.250.000
60	Lemari Kayu	Buah	2022	2	7.000.000
61	Lemari Makan	Buah	2022	1	4.750.000
62	Meja Kerja Kayu	Buah	2022	10	4.750.000
63	Sofa (Lokal/Satu)	Set	2022	1	59.000.000
64	Sofa (Lokal/Satu-satu)	Set	2022	1	25.500.000
65	Alat Pendingin Lainnya	Unit	2022	2	2.098.000
66	Loudspeaker	Unit	2022	1	16.855.000
67	Loudspeaker	Unit	2022	1	6.200.000
68	Microphone	Unit	2022	1	3.259.000
69	Microphone	Unit	2022	1	2.600.000
70	Mic Conference	Unit	2022	3	19.722.000
71	Dispenser	Unit	2022	2	3.198.000
72	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Set	2022	1	619.000
73	Meja Tamu Biasa	Buah	2022	7	13.195.000
74	Meja Tamu Biasa	Buah	2022	3	3.945.000
75	Audio Mixing Portable	Unit	2022	1	5.546.000
76	PC Unit	Unit	2022	4	59.056.000
77	Laptop	Unit	2022	6	71.292.000
78	Laptop	Unit	2022	1	6.500.000



79	Laptop	Unit	2022	1	14.300.000
80	Printer	Unit	2022	5	29.325.000
81	Printer	Unit	2022	1	3.075.000
82	Printer	Unit	2022	1	800.000
83	Printer	Unit	2022	1	2.695.000
84	Printer	Unit	2022	2	6.350.000
85	Sport Utility Vehide (SUV)	Unit	2023	1	677.100.000
86	Kipas Angin	Unit	2023	12	10.800.000
TOTAL INVENTARIS 2020-2023					2.192.358.130

(Sumber : Aplikasi SIMDA BMD)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu :

1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/ prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.

2. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan Pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah dilingkup pemerintah daerah. Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 7



Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2023 dapat diuraikan seperti berikut ini :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur dari indikator Nilai (EKPPD). Dalam penilaian tersebut komponen atau variabel yang diukur adalah : 1) Penetapan IKK; 2) teknik pengumpulan data; 3) Metodologi pengukuran kinerja; dan 4) Analisis, pembobotan, interpretasi kinerja. Adapun nilai EKPPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2019 adalah sebesar 2,5481 atau dikategorikan “TINGGI”. Dari nilai EKPPD Pemerintah Provinsi.

2. Penataan Kelembagaan Daerah

Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara didasari pada prinsip efektivitas, efisiensi dan rasional. Untuk mengukur hal tersebut didasarkan pada indikator Tingkat Kematangan Perangkat Daerah.

Untuk indikator Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara pada beberapa tahun terakhir belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan perhitungan tingkat kematangan perangkat daerah baru diterbitkan pada tahun 2018.

Adapun teknis perhitungan tingkat kematangan perangkat daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Sedangkan teknis penilaian tingkat kematangan perangkat daerah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pada dasarnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk empat tahun terakhir (2014 – 2019) mengalami peningkatan.

Adapun komponen dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja terdiri dari:

- a. Perencanaan Kinerja komposisinya 30% dari total nilai
- b. Pengukuran Kinerja, komposisinya 25% dari total nilai
- c. Pelaporan Kinerja, komposisinya 15% dari total nilai
- d. Evaluasi Internal, komponennya 10% dari total nilai
- e. Capaian Kinerja, komposisinya 20% dari total nilai

Berdasarkan pada komponen tersebut diatas, yang merupakan kewenangan dari Sekretariat Daerah adalah pada komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang cenderung mengalami peningkatan pada empat tahun terakhir, kondisi yang sama juga terjadi pada komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

4. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik Pemerintah Provinsi Maluku Utara diukur dari indikator Indeks Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Hasil evaluasi penentuan indikator Indeks Pelayanan Publik dilaksanakan pada 3 Unit Pelaksana Pelayanan (UPP) yakni pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kota Ternate dan Rumah Sakit Dr. H. Chasan Boesoeri Ternate.

5. Penegakan Hukum dan HAM



Pencapaian penegakan hukum dan HAM di Provinsi Maluku Utara tingkat ketercapaiannya diukur dari indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum dan HAM.

6. Konsistensi Produk Hukum Daerah

Pencapaian dari konsistensi produk hukum daerah Provinsi Maluku Utara diukur dari pencapaian indikator kinerja Persentase produk hukum daerah yang Konsisten. Untuk pencapaian indikator tersebut pada beberapa tahun terakhir belum dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Hal ini disebabkan penetapan indikator kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019 mengalami perubahan sehingga pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja tersebut tidak dilaksanakan.

7. Pendapatan Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Indikator PDRB yang dipilih adalah nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. PDRB dari sisi harga berlaku merupakan penjumlahan penggunaan dan pemanfaatan dari kegiatan produksi pada sektor-sektor perekonomian di Maluku Utara.

8. Pengawasan Harga Barang dan Jasa

Persentase barang dan jasa yang diawasi merupakan salah satu indikator yang ditetapkan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap harga barang dan jasa. Pencapaian untuk indikator tersebut tersebut untuk empat tahun terakhir belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena Renstra Sekretariat Tahun 2014 – 2019 penetapan indikatornya mengalami perubahan.

9. Pelayanan Informasi Kehumasan dan Keprotokolan

Persentase kegiatan Pimpinan Daerah yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media massa merupakan indikator kinerja dari pelayanan informasi kehumasan dan keprotokolan. Indikator kinerja tersebut pada beberapa tahun terakhir tingkat ketercapaiannya belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena



Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2019 untuk penetapan indikatornya mengalami perubahan.

10. Pengelolaan Tata Naskah Dinas

Waktu distribusi naskah dinas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu indikator kinerja dari Pengelolaan Tata Naskah Dinas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pada beberapa tahun terakhir, tingkat ketercapaiannya tidak dapat diukur. Hal ini disebabkan karena indikator kinerja pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2019 mengalami perubahan.

11. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Cakupan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel merupakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Tingkat ketercapaian untuk indikator ini pada beberapa tahun terakhir belum dapat diukur. Hal ini disebabkan penetapan indikator kinerja pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2019 mengalami perubahan.

12. Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah sarana dan prasarana yang tertangani merupakan salah satu indikator kinerja dari Sekretariat Daerah yang mengukur kondisi dari sarana dan prasarana perkantoran Gubernur Maluku Utara. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator tersebut adalah perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana perkantoran lingkup Kantor Gubernur Maluku Utara. Adapun kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam beberapa tahun terakhir tingkat ketercapaiannya belum dapat diukur. Hal ini disebabkan data terkait kondisi sarana dan prasarana perkantoran hingga Renstra ini disusun ketersediaan datanya belum terpenuhi.

13. Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan Daerah

Jumlah pelayanan umum rumah tangga pimpinan sekretariat daerah yang tertangani merupakan indikator yang ditetapkan untuk pelayanan rumah umum rumah tangga Pimpinan Daerah. Pencapaian indikator ini pada beberapa tahun terakhir tingkat



ketercapaiannya belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data belum tersedia hingga penyusunan Renstra ini.

14. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Tingkat kecukupan sarana dan prasarana peribadatan di Maluku Utara diukur dari indikator kinerja Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk. Pencapaian dari indikator tersebut untuk beberapa tahun terakhir tingkat ketercapaiannya belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data capaian indikator tersebut tidak tersedia.

15. Pelayanan Hari Besar dan Kegiatan Keagamaan

Keberhasilan pelayanan hari besar dan kegiatan keagamaan diukur dari indikator kinerja Jumlah pelayanan hari besar dan kegiatan keagamaan. Adapun pencapaian dari indikator tersebut untuk beberapa tahun terakhir data ketercapaiannya belum tersedia hingga penyusunan Renstra ini. Hal ini disebabkan karena penetapan indikator kinerja pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2019 mengalami perubahan.

16. Ketersediaan Tenaga Fasilitator Keagamaan

Ketersediaan tenaga fasilitator keagamaan di Provinsi Maluku Utara meliputi tenaga medis (Tim Kesehatan Haji Daerah, TKHD) untuk para jemaah haji dan pendamping manasik (Tim Pembimbing Haji Daerah, TPHD). Hingga tahun 2019 ketersediaan tenaga fasilitator keagamaan tersebut meliputi :

Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) = 3 Orang

Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) = 5 Orang

Tenaga fasilitator yang berjumlah 8 orang pada tahun 2019 tersebut memberikan pelayanan pendampingan pada 3 kloter Jema'ah Haji Maluku Utara. Adapun jumlah jemaah haji setiap kloternya adalah berjumlah 450 orang Jema'ah Haji.

Jika dilihat dari jumlah jema'ah haji tersebut, Maluku Utara masih kekurangan jumlah tenaga fasilitator keagamaan. Dalam kondisi ideal, jumlah tenaga fasilitator setidaknya berjumlah 15 orang untuk Tim Kesehatan Daerah dan 15 orang Tim Pembimbing Haji Daerah.



17. Pembinaan Lembaga Keagamaan, Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Kaum Perempuan.

Jumlah pembinaan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan kaum perempuan merupakan salah satu indikator kinerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan dalam Renstra 2014 – 2019. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator tersebut untuk beberapa tahun terakhir belum dapat diukur. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data indikator tersebut hingga Renstra ini disusun belum tersedia.

18. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Konsultansi Melalui LPSE dan ULP

Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa konsultansi lainnya melalui LPSE dan ULP sebagai salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019. Adapun tingkat ketercapaiannya untuk beberapa tahun terakhir belum bisa diukur. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data capaian tersebut hingga penyusunan Renstra 2019 – 2024 tidak tersedia. Berikut Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah :



Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun..					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Ekonomi				65,5	65,6	65,7	65,8	65,9										
2	Indeks Kebebasan Sipil				100%	100%	100%	100%	100%										
3	Skor LPPD Tinggi.				2,6	2,7	2,8	2,9	3	n/a	2,53	2,6819	n/a	n/a	n/a	93,70	95,78	n/a	n/a
4	Jumlah produk hukum daerah Provinsi Maluku Utara yang konsisten sdan harmonis sesuai peraturan perundang-undangan yang mencakup pembangunan hukum di daerah				8 Perda, 50 Pergub, 8 Naskah Akademi k	8 Perda, 50 Pergub, 8 Naskah Akademi k	8 Perda, 50 Pergub, 8 Naskah Akademi k	8 Perda, 50 Pergub, 8 Naskah Akademi k	8 Perda, 50 Pergub, 2 Naskah Akademi k				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Nilai Pelaporan Kinerja dan Nilai Capaian Kinerja				BB	BB	A	A	A	B	B	B	B	n/a	60%	60%	50%	50%	n/a
6	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah				III	IV	IV	IV	IV	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Indeks Kepuasan Masyarakat				A	A	A	A	A	A	A	A	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
8	Persentase Pengelolaan sarana prasarana pemerintah Provinsi Maluku Utara				100%	100%	100%	100%	100%	83%	80%	91%	63%	n/a	83%	80%	91%	63%	n/a
9	Persentase Pengelola Pengadaan barang dan jasa yang Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, adil dan akuntabel				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitas Administrasi, Keptokoleran, Kehumasan Pimpinan Yang Berkualitas				n/a	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	n/a	80%	85%	85%	71%	n/a	100,00%	106,25%	106,25%	88,75%



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dapat diketahui bahwa kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dan/atau mengkoordinir Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara;
- b. Komando Distrik Militer 1505 Maluku Utara;
- c. Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- d. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- e. Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara;
- f. Pengadilan Agama Provinsi Maluku Utara;
- g. Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;
- h. Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- j. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara (urusan optimalisasi pendapatan asli daerah);
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara;
- n. Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;
- p. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara;
- q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- s. Pemerintahan Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara;
- t. Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara;
- u. KPU Provinsi Maluku Utara;
- v. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;



- w. Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
 - x. BNN Provinsi Maluku Utara; dan
 - y. BPJS Kesehatan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dan/atau mengkoordinir perangkat daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara di daerah sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
 - d. Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara;
 - e. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;
 - g. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
 - h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara;
 - k. Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara;
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara;
 - n. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara;
 - o. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Tanjungpandan;
 - p. Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Baabullah;
 - q. Stasiun Meteorologi dan Geofisika Provinsi Maluku Utara;
 - r. PT Pelindo;
 - s. PT ASDP;
 - t. PT TELKOM;
 - u. PT PELNI;



- v. PT PLN;
 - w. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batu Mentas Provinsi Maluku Utara; dan
 - x. Perum BULOG Kansilog Maluku Utara.
3. Asisten Administrasi Umum :
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dan/atau mengoordinir perangkat daerah, Instansi Vertikal, di daerah sebagai berikut :
- a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara (urusan lain-lain pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah);
 - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
 - g. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara;
 - h. Kantor Bea Cukai Provinsi Maluku Utara;
 - i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Maluku Utara; dan
 - j. Perusahaan Perbankan (BUMN).



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah. Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam pemenuhan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara mengandung permasalahan inti “Belum Optimalnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara”. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipetakan akar permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, antara lain :
 - 1) Belum terselesainya Penyelesaian sengketa pulau antara antara provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku dan fasilitasi penyelesaian sengketa pulau antar Kabupaten dan kota dalam provinsi maluku utara serta Pembangunan pilar batas antar Kabupaten dan kota.
 - 2) Belum Optimalnya penganggaran peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat (GWPP) dalam mendukung pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat di daerah.
 - 3) Belum Optimalnya Fasilitasi Administrasi Kepala daerah dan DPRD.
 - 4) Pemekaran Wilayah atau persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih moratorium.
 - 5) Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang belum memenuhi target.
 - 6) Belum optimal Kerja Sama antar Pemerintah dan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta.



- 7) Belum optimalnya kualitas, intensitas dan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 8) Kurangnya Tenaga perancang undang-undang / produk hukum daerah;
- 9) Kurangnya Tenaga bantuan hukum dalam beracara di Pengadilan;
- 10) Kurangnya Tenaga pengelolaan IT untuk penataan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum.

Masalah ini timbul disebabkan karena koordinasi dalam penanganan masalah di Provinsi Maluku Utara belum optimal, belum sinkronnya kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten terkait dengan urusan di bidang pertanahan di daerah, belum adanya penetapan dan penegasan wilayah administrasi, belum optimalnya data yang disampaikan oleh masing-masing OPD, belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), kurangnya kuantitas dan kualitas SDM serta kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan bidang Perekonomian dan Pembangunan :
 - 1) Masih lemahnya OPD dalam penginputan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tepat waktu;
 - 2) Masih rendahnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap OPD untuk melakukan pencatatan secara elektronik pada aplikasi SPSE;
 - 3) Belum tertibnya penggunaan aplikasi AMEL (Aplikasi Monitoring Elektronik Lokal) pada Perangkat Daerah;
 - 4) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Biro Adbang;
 - 5) Belum adanya *website* dan aplikasi sistem elektronik terkait pengendalian dan pelaporan Pembangunan wilayah yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - 6) Minimnya SDM yang berkualitas;



- 7) Tinggi biaya transportasi terutama daerah yang sulit dijangkau;
- 8) Belum adanya gudang penyangga komoditas barang;
- 9) Belum adanya koordinasi yang efektif dalam pengendalian harga pasar;

Masalah ini timbul disebabkan karena koordinasi pengendalian dan evaluasi program perekonomian dan pembangunan belum optimal, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, belum optimalnya pengelolaan BUMD, advokasi pengadaan barang jasa belum optimal, produk UMKM banyak yang belum masuk di *e-catalog local*, belum seluruhnya proses barang dan jasa melalui *e-procurement*, kurangnya pemahaman pelaku pengadaan serta pemutakhiran data dan informasi terkait perekonomian belum optimal.

3. Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan bidang Administrasi Umum :

- 1) Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Belum efisien, efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Rendahnya komitmen dari para penyelenggara unit pelaksana pelayanan untuk melaksanakan pelayanan publik secara maksimal;
- 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana kerja dalam memberikan kenyamanan peningkatan kinerja aparatur;
- 5) Pengelolaan Aset sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah belum tertata dengan baik;
- 6) Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya ASN dalam pelaksanaan pelayanan umum berdasarkan hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN lingkup unit kerja yang masih dalam kategori sangat rendah;
- 7) Kurang ketersediaan tenaga penyusun meteri pimpinan;
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyusunan materi pimpinan;



-
- 9) Belum optimalnya koordinasi OPD dalam kegiatan Pimpinan;
10) Kurangnya fasilitas dalam pelayanan tamu pusat ke daerah.
Masalah ini timbul disebabkan karena koordinasi pengelolaan barang milik daerah belum optimal, kurangnya pemahaman OPD dalam pengelolaan SAKIP dan RB, pemanfaatan teknologi keprotokolan dan komunikasi pimpinan belum optimal, kurangnya pemahaman terkait perencanaan, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM serta kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.

3.2 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Selama kurun waktu beberapa tahun ke depan, Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai institusi yang memberikan *supporting* kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas secara horizontal, vertical, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas juga dilaksanakan koordinasi lintas lingkup dalam menjalankan Pemerintahan Daerah.

Hal-hal yang merupakan isu-isu persoalan yang selalu menjadi fenomena dalam evaluasi kinerja adalah adanya perumusan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara melalui Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah serta memantapkan koordinasi terhadap



perangkat daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat memuaskan kepada masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara secara umum dapat dibagi menjadi isu-isu utama, yang terdiri dari :

1. Isu Terkait Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Belum adanya Regulasi terkait Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kurangnya koordinasi;
 - c. Belum terinternalisasi kerja bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Isu Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - a. Penyelesaian permasalahan sengketa pulau antara antar provinsi dan Fasilitasi sengketa pulau antar Kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi maluku utara serta Pembangunan pilar batas antar Kabupaten /kota agar terjamin kejelasan batas wilayah antara provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Peningkatan penganggaran peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam mendukung pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat di daerah.
 - c. Peningkatan pelayanan Administrasi Kepala daerah dan DPRD yang efektif, efisien dan harmonis.
 - d. Ketimpangan pembangunan antar daerah dan rentan kendali serta kondisi geografis yang berbentuk kepulauan sehingga diperlukan Pemekaran Wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB).
 - e. Peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada pelayanan dasar dan indikator kinerja kunci (*outcome* dan *output*) pada perangkat daerah.
 - f. Peningkatan Kerja Sama antar Pemerintah dan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta untuk mengurangi beban keuangan pemerintah daerah.



3. Isu Terkait Penyelenggaraan Hukum :
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan penelaahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan / Instruksi Kepala Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan fasilitasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum dan memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah;
 - d. Melakukan desiminasi / penyebarluasan produk hukum serta melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum.
4. Isu Terkait Perekonomian dan Pembangunan :
 - a. Evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah belum optimal.
 - b. Inflasi yang terjadi di daerah yang belum dapat ditangani secara maksimal;
 - c. Penyelenggaraan koodinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pembangunan secara elektronik;
 - d. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan;
 - e. Proses pemilihan penyedia barang/jasa lokal yang belum sesuai dengan RUP;
 - f. Penyedia barang/jasa lokal yang banyak belum tersedia.
5. Isu Terkait Pelayanan Publik :
 - a. Belum terlaksananya survey kepuasan di lingkup sekretariat;
 - b. Belum adanya standar pelayanan yang sesuai standar operasional prosedur;
 - c. Belum adanya sistem layanan yang berbasis digital dan terintegrasi;
 - d. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
 - e. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan komitmen tersebut.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu, sedangkan Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026. Tujuan dan sasaran-sasaran RPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 sendiri telah ditetapkan berdasarkan pengejawantahan dari isu-isu strategis pembangunan daerah yang telah dirumuskan, mengacu pada rancangan RPJPD Provinsi Maluku Utara 2025-2045, yang telah diselaraskan dengan rancangan RPJMN khususnya arah kebijakan kewilayahan pembangunan wilayah Maluku Utara untuk 20 tahun mendatang diarahkan sebagai “Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia” dengan koridor ekonomi yang difokuskan sebagai “Hub Ekonomi Biru Timur Indonesia”. Visi RPJP Provinsi Maluku Utara 2025-2045 yaitu **“Maluku Utara Mariomoi sebagai Hub Kemaritiman Timur Indonesia yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita, yang ditandai meningkatnya PDRB per kapita, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, dan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, yang ditandai menurunnya tingkat kemiskinan, terjaganya rasio gini pada kategori rendah, meningkatnya kontribusi PDRB terhadap nasional, dan berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah;



3. Peningkatan daya saing daerah di nasional, yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Daya Saing Daerah;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia; dan
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang ditandai dengan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. Dengan tujuan ini, Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara periode 2025-2026 dimana Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yang merupakan unsur staf penyelenggaraan bidang administrasi perekonomian dan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta administrasi umum. Adapun indikator tujuan atau sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dapat dilihat sebagaimana Tabel. 4.1 berikut ini :



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke..	
			2025	2026
Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul, Sehat dan Sejahtera		Persentase Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul, Sehat dan Sejahtera	100%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%
Meningkatkan Perekonomian dan Pemerataan Pembangunan Daerah		Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	100%	100%
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Akuntabel dan Melayani		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	100%	100%
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang administrasi umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum	100%	100%
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Baik Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Terwujud.	100%	100%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Baik Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Kerja Sama	100%	100%
Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara		Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara Yang Terlaksana	100%	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Maluku Utara	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual Bagi Masyarakat Maluku Utara	100%	100%
		Persentase Fasilitasi Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Maluku Utara	100%	100%
		Persentase Fasilitasi Non Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Maluku Utara	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah Yang Konsisten dan Harmonis Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Produk Hukum Daerah Yang Konsisten dan Harmonis	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Yang Konsisten dan Harmonis Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Produk hukum yang dihasilkan	100%	100%
Mewujudkan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Indeks Daya Saing Ekonomi	100%	100%
	Terwujudnya Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Yang Terkelola Dengan Baik	100%	100%
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Pengelola Sumber Daya Alam Yang Baik	100%	100%
		Persentase Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Pengelola BUMD dan BLUD	100%	100%
Mewujudkan Manajemen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yang Berkualitas		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%
	Meningkatnya Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	80%	80%
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM BPBJ	60%	60%
		Tingkat Kematangan PBJ	Level 3	Level 3



Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
Periode 2025-2026

Mewujudkan Administrasi Daerah, Wilayah dan Pelaporan Yang Baik	Pengendalian Pembangunan		Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah dan Pelaporan Yang Baik	100%	100%
	Melaksanakan Administrasi Daerah, Wilayah dan Pelaporan Yang Baik		Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	100%	100%
			Persentase Pengendalian Pembangunan Wilayah Yang Terlaksana	100%	100%
			Persentase Laporan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Wilayah Yang Tersedia	100%	100%
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Serta Layanan Publik Yang Prima			Persentase Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Baik, Efektif, Efisien dan Layanan Publik Yang Prima	100%	100%
	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara		Persentase kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%
			Level Kelembagaan Daerah	100%	100%
			Indek Pelayanan Publik	100%	100%
Menyediakan Sarana & Prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah yang Berkualitas dan Memadai			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Memadai	100%	100%
	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Baik dan Akuntabel		Persentase Pengelolaan Keuangan Setda Yang Baik dan Akuntabel	100%	100%
Mewujudkan Manajemen Administrasi Pimpinan Yang Berkualitas			Persentase Manajemen Administrasi Pimpinan Yang Terlaksana	100%	100%
	Terwujudnya Administrasi Pimpinan Keprotokolan Serta Kehumasan Yang Berkualitas		Persentase Fasilitas Keprotokoleran Yang Terlaksana	100%	100%
			Persentase Fasilitas Kehumasan Yang Terlaksana	100%	100%
			Persentase Administrasi Perencanaan, Kepegawaian Sekretariat Yang Terlaksana	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan strategi dan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada RPD Maluku Utara periode 2025-2026 dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada table 5.1 berikut :



Tabel 5.1 **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul, Sehat dan Sejahtera	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Melakukan Asistensi dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	Melaksanakan Bimbingan Teknis
		2 Melakukan pembinaan keagamaan dan spiritual terkait kesejahteraan rakyat	Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana tempat beribadat dan kemasyarakatan
		3 Membuat prodak hukum daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan harmoni yang lebih tinggi
Meningkatkan Perekonomian dan Pemerataan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1 Melakukan rapat evaluasi terhadap PPK untuk melakukan pencatatan dalam aplikasi SPSE	Melakukan movev terhadap PPK dalam pencatatan data terutama dalam proyek strategis daerah
		2 Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pada PPK agar tertib dalam pencatatan keuangan negara dalam aplikasi SPSE	Mendukung percepatan program MCP KPK dan Pemberantasan Korupsi
		3 Penerbitan regulasi terkait percepatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Peningkatan SDM Pengelola Pengadaan Barang Jasa di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara
		4 Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intens dengan LKPP dalam mendorong pencatatan peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Upaya peningkatan ITKP Pemerintah Provinsi Maluku Utara minimal berpredikat baik
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang administrasi umum	1 Melakukan Asistensi dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah Melaksanakan Sosialisasi Secara Berkala

Tabel di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan RPD Maluku Utara periode 2025-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.



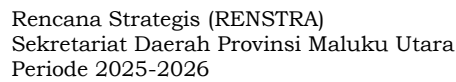
BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 :

6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel di bawah ini :



Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tjuhan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Pemerintah Yang Bertanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul, Sehat dan Sejahtera				Persentase Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul, Sehat dan Sejahtera		100%	76.305.000.000	100%	83.935.500.000				
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
Meningkatkan Perkonomian dan Pemetaan Pembangunan Daerah				Persentase Perekonomian dan Pembangunan Daerah		100%	21.660.500.000	100%	23.826.850.000				
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Perekonomian dan Pembangunan			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Perekonomian dan Pembangunan									
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif		100%	49.785.000.000	100%	54.788.800.000				
	Meningkatnya koordinasi pemerintahan bidang administrasi umum			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum									
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Melayani dan Inovatif				Indeks Reformasi Birokrasi								Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Melayani dan Inovatif			LPPD								Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Baik Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Terwujud.								Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yang Baik Dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara			Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan								Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
				Persentase Otonomi Daerah								Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
				Persentase Penyelenggaraan Kerja Sama								Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara



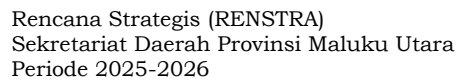
			PROGRAM PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH	PRESENTASE DAN PENYELANGARAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100%	100%	4.900.000.000	100%	5.390.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pelaksanaan Pemerintahan	Tugas Pemerintahan	100%	100%	1.700.000.000	100%	1.870.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	770.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pelaksanaan Daerah	Presentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100%	1.700.000.000	100%	1.870.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dokumen	25 Dokumen	700.000.000	30 Dokumen	770.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Otonomi dan Penataan Urusan Yang Diaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	11 Laporan	11 Laporan	500.000.000	11 Laporan	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Fasilitasi Daerah	Sama Presentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Fasilitasi Kerja Sama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Difasilitasi	14 Dokumen	15 Dokumen	500.000.000	15 Dokumen	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Yang Difasilitasi	9 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000	12 Dokumen	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Yang Dievaluasi	0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PERUKJANG	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Tersusunya Dokumen dan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penyusunan Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	55.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan RKASRPD	Jumlah Dokumen RKASRPD dan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASRPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara

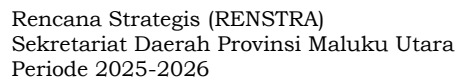


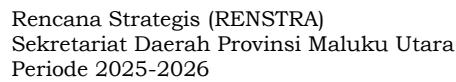
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	120.000.000	100%	132.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	185.000.000	100%	203.500.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penyusunan dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara



			Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Administrasi Kepengawalan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	500.000.000	100%	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Sosialisasi Peraturan Jumlah Onang yang Mengikuti Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Bimbingan Implementasi Peraturan Jumlah Onang yang Mengikuti Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	200.000.000	20 Orang	220.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Administrasi Penunjang Penguatan Daerah	100%	100%	525.000.000	100%	577.500.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Penguatan Daerah	20 Paket	20 Paket	50.000.000	20 Paket	55.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Penguatan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	475.000.000	10 Laporan	522.500.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Penguatan Daerah	100%	100%	420.000.000	100%	462.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Penguatan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Unum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	18 Laporan	400.000.000	18 Laporan	440.000.000	n/a	n/a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Maluku Utara
Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Yang Solaras, Inklusif dan Berkeadilan			Tingkat Kemiskinan								Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)								Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
			Prevalensi Stunting (Pendak dan Sangat Pendak) Pada Balita (%)								Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
			Indeks Pembangunan Pemuda								Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara

58

59

60



				Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdaerah Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	100.000.000	15 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	200.000.000	15 Orang	220.000.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Administrasi Daerah Umum Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	700.000.000	100%	770.000.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.000.000	20 Paket	165.000.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	50.000.000	20 Paket	55.000.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Penyenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	500.000.000	10 Laporan	550.000.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Penyediaan Jasa Umum Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	339.000.000	100%	372.900.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Menyurat	11 Laporan	15.000.000	11 Laporan	16.500.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
				Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	324.000.000	18 Laporan	356.400.000	n/a	n/a	Biro Kesejahteraan Rakyat	Maluku Utara
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, malayu dan inovatif				Indeks Reformasi Birokrasi							Biro Hukum	Maluku Utara
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Malayani dan Inovatif				SAKIP							Biro Hukum	Maluku Utara
				Penetapan Produk Hukum Daerah Yang Konsisten dan Harmonis							Biro Hukum	Maluku Utara
				Penetapan Produk Hukum Daerah Yang Produk hukum yang dihasilkan							Biro Hukum	Maluku Utara
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	100%	3.400.000.000	100%	3.740.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
				Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Pengaturan Produk Hukum Pengaturan yang Dausun	50 Dokumen	550.000.000	100 Orang	605.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
				Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Dausun	20 Dokumen	550.000.000	25 Orang	605.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara



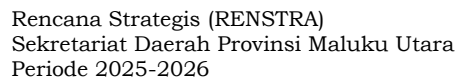
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Diklat dan Dokumen Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Dikelola Informasinya	11 Perda Dan 13 Pergub	550.000.000	14 Perda Dan 16 Pergub	605.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penelitian dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Diklasifikasi dan Devaluasi	Jumlah Produk Hukum yang Diklasifikasi dan Devaluasi	11 Perda Dan 13 Pergub/Dokumen	550.000.000	15 Perda Dan 17 Pergub	605.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penelitian Bantuan Hukum	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.320.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penelitian Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	15 Kasus	600.000.000	30 Kasus	660.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penelitian Masalah Non Litigasi dan Yang Diselesaikan HAM	15 Kasus/Peristiwa	15 Kasus/Peristiwa	600.000.000	20 Kasus/Peristiwa	660.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	450.000.000	100%	495.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penelitian dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Koordinasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	330.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penelitian Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	5 Paket	110.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penelitian Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	50.000.000	6 Paket	55.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	135.000.000	100%	148.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara

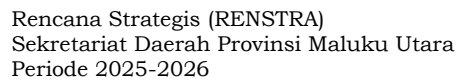


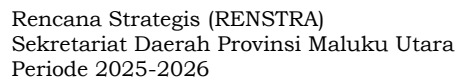
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Administrasi Keuangan dan Perencanaan	100%	100%	105.000.000	100%	115.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	145.000.000	100%	160.600.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penyusunan dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Pengawasan dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Pembinaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	23.000.000	1 Laporan	25.300.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Pemantauan dan Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	19.800.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara



			Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Penyusunan Perangkat Daerah	100%	400.000.000	100%	440.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	200.000.000	26 Dokumen	220.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Administrasi Umum	Penyusunan Perangkat Daerah	100%	450.000.000	100%	495.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Persediaan Barang Pengadaan	Barang Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	55.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	330.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Penyediaan Pemangaj Peningkatan Peningkatan Daerah	Jasa Penunjang Peningkatan Peningkatan Daerah	100%	314.000.000	100%	345.400.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	15.400.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
			Persediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	300.000.000	18 Laporan	330.000.000	n/a	n/a	Biro Hukum	Maluku Utara
				Laju Pertumbuhan Ekonomi							Biro Ekonomi	Maluku Utara
				PDRB Perkapita (Rp. Juta)							Biro Ekonomi	Maluku Utara
				Indek Daya Saing Ekonomi							Biro Ekonomi	Maluku Utara
				Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Perencanaan Yang Terseleksi Dengan Baik							Biro Ekonomi	Maluku Utara
				Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Perencanaan Yang Terseleksi Dengan Baik							Biro Ekonomi	Maluku Utara

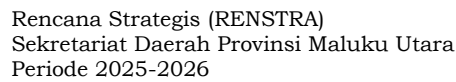
65

66

67



			Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	n/a	n/a	Biro Ekonomi	Maluku Utara
			Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	n/a	n/a	Biro Ekonomi	Maluku Utara
			Penyenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	275.000.000	n/a	n/a	Biro Ekonomi	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Penataasahan Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	325.000.000	100%	357.500.000	n/a	n/a	Biro Ekonomi	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Surel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Menyurat	11 Laporan	15.000.000	11 Laporan	16.500.000	n/a	n/a	Biro Ekonomi	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	310.000.000	18 Laporan	341.000.000	n/a	n/a	Biro Ekonomi	Maluku Utara
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bereth, Akuntabel, Melayani dan Inovatif	Tutakeba Yang Bereth, Akuntabel, Melayani dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi							Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			SPBE							Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Indeks Teta Kelda Pengadaan Barang dan Jasa							Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yang Berkualitas	Meningkatnya Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pemanfaatan Sijin Pengadaan							Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Kualifikasi dan Kompetensi SDM BPEJ							Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Tingkat Kemungkinan PBJ							Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			PROGRAM KEBLIKAKAN Rasio Realisasi Belanja Pengadaan DAN PELAYANAN Barang/Jasa Yang Dilaksanakan PERGADAAN BARANG Sesaat Ketentuan Yang Berlaku DAN JASA	100%	3.695.500.000	100%	4.065.050.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	977.500.000	100%	1.075.250.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Pengelolaan Strategi Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	400.000.000	5 Laporan	440.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Pelaksanaan Pengadaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	275.000.000	5 Laporan	302.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pengadaan Barang dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Laporan	302.500.000	5 Laporan	332.750.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara

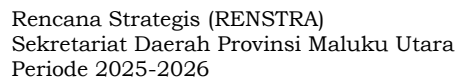
69



			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	85.000.000	100%	93.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Koordinasi Pelaksanaan Akutansi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Akutansi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Tugaspemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dan Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	145.000.000	100%	159.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Koordinasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Koordinasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Rekonsiliasi dan Penyesuaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyesuaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah		100%	100%	500.000.000	100%	550.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara



			Penyediaan Pakan Dinau Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Keringgapan Kelengkapannya	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Bimbingan Teknis Jumlah Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	200.000.000	20 Orang	220.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Administrasi Umum Pengangkat Daerah	100%	450.000.000	100%	495.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.000.000	20 Paket	165.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyediaan Barang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan	20 Paket	50.000.000	20 Paket	55.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	250.000.000	10 Laporan	275.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Jasa Penyediaan Penjual Penerimaan Daerah	100%	575.000.000	100%	632.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	5.000.000	10 Laporan	5.500.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Pelanggan Unsur Kantor	12 Laporan	570.000.000	12 Laporan	627.000.000	n/a	n/a	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Maluku Utara
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Melayani dan Inovatif			Indikator Tujuan : Indeks Reformasi birokrasi							Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Indikator Sasaran : SARIP							Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
Mewujudkan Pemerintahan Daerah, Wilayah dan Pelaporan Yang Baik			Presentasi Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah dan Pelaporan Yang Baik							Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Presentase Pembangunan Daerah Yang Terlaksana							Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Presentase Pembangunan Wilayah Yang Terlaksana							Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Presentase Laporan Pengendalian Pemangunan Daerah dan Wilayah Yang Tersedia							Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			PROGRAM KEBELAJARAN ADMINISTRASI PEMANGUNAN	100%	9.400.000.000	100%	10.340.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara

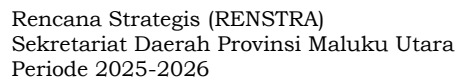
72



		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	100%	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Daerah	Ketercapaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	110.000.000	100%	121.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Koordinasi Pelaksanaan Akutansi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Akutansi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tunggapan Penerimaan dan Tindak Lanjut Penerimaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	dan Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	30.000.000	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	190.000.000	100%	209.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Pembinaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Rekonsiliasi dan Penyesuaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyesuaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Penyusunan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Perencanaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
		Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian	100%	100%	400.000.000	100%	440.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara



			Perencanaan Pakuan Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Keringgapan Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Implementasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Administrasi Umum Penastase Administrasi Daerah Ketecapaian Daerah	100%	100%	700.000.000	100%	770.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Penyenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	440.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Survei Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Laporan	18 Laporan	350.000.000	18 Laporan	385.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Serta Layanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara		Penastase Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Baik, Efektif, Efisien dan Layanan Publik Yang Prima	100%	100%	370.000.000	100%	407.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pembangunan	Maluku Utara
			Reformasi Birokrasi									
			Level Kelembagaan Daerah									
			Indek Pelayanan Publik									
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	100%	100%	3.350.000.000	100%	3.685.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penastase Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100%	100%	1.300.000.000	100%	1.430.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penastase Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	385.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara

75



		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	160.000.000	100%	176.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Pengelolaan dan Penyusunan Jumlah Dokumen Bahan Tunggapan Penerimaan dan Tindak Lanjut Penerimaan	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
		Administrasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	170.000.000	100%	187.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penyusunan dan Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	27.500.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penyusunan dan Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penyusunan dan Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	27.500.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
		Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	500.000.000	100%	550.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara



			Perediaan Pakuan Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Keringgapan	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	100.000.000	20 orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	200.000.000	20 orang	220.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Administrasi Umum Tingkat Penemuan Administrasi Umum	100%	580.000.000	100%	638.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Perediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Perediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	80.000.000	5 Paket	88.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penyenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	300.000.000	10 Laporan	330.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Survei Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei Menyurat	100%	400.000.000	100%	440.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Perediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelaporan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	380.000.000	18 Laporan	418.000.000	n/a	n/a	Biro Organisasi	Maluku Utara
			Memediakan Sama & Prasana di Lingkungan Sekretariat Daerah yang Berkualitas dan Memadai	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasana yang Berkualitas dan Memadai	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasana yang Berkualitas dan Memadai	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasana yang Berkualitas dan Memadai	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasana yang Berkualitas dan Memadai	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasana yang Berkualitas dan Memadai	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasana yang Berkualitas dan Memadai	Biro Umum	Maluku Utara
			Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Baik dan Akuntabel	Prosentase Pengelolaan Keuangan Setda yang Baik dan Akuntabel	Prosentase Pengelolaan Keuangan Setda yang Baik dan Akuntabel	Prosentase Pengelolaan Keuangan Setda yang Baik dan Akuntabel	Prosentase Pengelolaan Keuangan Setda yang Baik dan Akuntabel	Prosentase Pengelolaan Keuangan Setda yang Baik dan Akuntabel	Prosentase Pengelolaan Keuangan Setda yang Baik dan Akuntabel	Biro Umum	Maluku Utara
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	n/a	32.629.000.000	n/a	35.891.900.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Administrasi Umum	n/a	4.624.000.000	n/a	5.086.400.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Perediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n/a	400.000.000	n/a	440.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Perediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	550.000.000	n/a	605.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Perediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	50.000.000	n/a	55.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara



			Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	n/a	n/a	540.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	n/a	n/a	24.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	n/a	n/a	60.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	n/a	n/a	3.300.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	5.270.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	n/a	n/a	200.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	n/a	n/a	1.500.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	n/a	n/a	2.000.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Perlakuan dan Jumlah Unit Perlakuan dan Mesin Mebel Lainnya	n/a	n/a	750.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	n/a	n/a	20.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	n/a	n/a	500.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	n/a	n/a	300.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	5.225.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	n/a	275.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	n/a	n/a	900.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	n/a	n/a	4.050.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	15.510.000.000	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara



			Penyediaan Pemeliharaan, dan Pajak Jabatan Yang Dipelihara Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa/Jumlah Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		n/a	220.000.000	n/a	n/a	242.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Dipelihara dan Dibiayarkan Pajak Perawatan Kendaraan Dinas dan Perawatannya Operasional atau Lapangan	Jasa/Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	110.000.000	n/a	n/a	121.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyelenggaraan Perawatan dan Mesin dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	n/a	n/a	165.000.000	n/a	n/a	181.500.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	14.300.000.000	n/a	n/a	15.730.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Sarana dan Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor Lainnya	n/a	n/a	440.000.000	n/a	n/a	484.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Bangunan Lainnya Yang Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Bangunan Lainnya	n/a	n/a	275.000.000	n/a	n/a	302.500.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Facility Maintenance Sekretariat Daerah		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Kebutuhan Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Kebutuhan Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Kebutuhan Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Kebutuhan Tangga Sekretaris Daerah Yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara



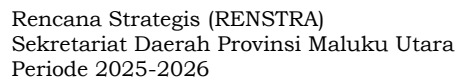
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara	
			Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Paksiatn Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	Jumlah Paket Pasiatn Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyediaan Operasional Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Operasional Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja peningkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja peningkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	275.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	55.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian dan Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Capaian dan Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara



			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah	1 Laporan	100%	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	90.000.000	100%	99.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi Pelaksanaan Akutansi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Akutansi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Bahan Tunggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dan Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	190.000.000	100%	209.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, dan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.500.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Penyusunan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Pembinaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
			Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian	1	1	500.000.000	1	550.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara



		Pengadaan Paksa Dinas Jumlah Paket Pakisan Dinas Beserta Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	1 Paket	220.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	220.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Administrasi Umum Persentase Penyelesaian Dokumen	100%	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	660.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Penyediaan Barang Persentase Penyelesaian Dokumen dan Penggandaan	20 Paket	20 Paket	50.000.000	20 Paket	50.000.000	20 Paket	55.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Penyediaan Bahan Logistik yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	350.000.000	10 Laporan	350.000.000	10 Laporan	385.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Penyediaan Jasa Surti Persentase Terasuaya Laporan Pemeliharaan Daerah	10 Laporan	100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	407.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Penyediaan Jasa Surti Persentase Terasuaya Laporan Pemeliharaan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	70.000.000	10 Laporan	70.000.000	10 Laporan	77.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Laporan	18 Laporan	300.000.000	18 Laporan	300.000.000	18 Laporan	330.000.000	n/a	n/a	Biro Umum	Maluku Utara
Mewujudkan Manajemen Administrasi Pimpinan Yang Berkualitas		Administrasi Pimpinan Yang Terakreditasi	100%	100%	7.370.000.000	100%	7.370.000.000	100%	8.134.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
		Administrasi Pimpinan Yang Terakreditasi	100%	100%	1.550.000.000	100%	1.550.000.000	100%	2.035.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
		Administrasi Pimpinan Yang Terakreditasi	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
		Administrasi Pimpinan Yang Terakreditasi	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	440.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
		Administrasi Pimpinan Yang Terakreditasi	100%	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.375.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara

83



Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
Periode 2025-2026

			Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sistem dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	82.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	500.000.000	12 Orang	550.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	250.000.000	12 Orang	275.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Bimbingan Teknik Jumlah Orang yang Mengikuti Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	250.000.000	12 Orang	275.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Administrasi Keuangan Daerah	100%	160.000.000	100%	176.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	82.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Koordinasi Pelaksanaan Akutansi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Pengelolaan dan Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	11.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Penyusunan Laporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Administrasi Barang Milik Daerah	100%	195.000.000	100%	214.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Penyusunan dan Jumlah Rencana Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara
			Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pinpinan	Maluku Utara



				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Paket	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	15 orang	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	15 orang	22.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1	27.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Administrasi Perangkat Daerah	Umum Persentase Ketercapaian Daerah (Biro Adpin)	100%	100%	525.000.000	100%	577.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Penyediaan dan Penggandaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	50.000.000	10 Paket	55.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	150.000.000	3 Paket	165.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	75.000.000	24 Laporan	82.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	275.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	100%	100%	750.000.000	100%	825.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	750.000.000	5 Paket	825.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Pembiayaan Penguasaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Penguasaan dan Pengawasan	100%	100%	155.000.000	100%	170.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000	10 Laporan	5.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	165.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Pemeliharaan dan Perawatan	Persentase Perawatan dan Mesin	100%	100%	110.000.000	100%	121.000.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Pemeliharaan dan Perawatan	Jumlah Laporan Perawatan dan Mesin	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	82.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara
				Pemeliharaan dan Perawatan	Jumlah Laporan Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Laporan	10 Laporan	35.000.000	10 Laporan	38.500.000	n/a	n/a	Biro Administrasi Pimpinan	Maluku Utara



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja atau *performance* atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk



mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD.

Tabel 7.1 **Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD
		Tahun (n)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6
Indikator Tujuan					
1	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul, Sehat dan Sejahtera		100%	100%	100%
Indikator Sasaran					
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		100%	100%	100%
Indikator Tujuan					
3	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah		100%	100%	100%
Indikator Sasaran					
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan		100%	100%	100%
Indikator Tujuan					
5	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel dan Melayani		100%	100%	100%
Indikator Sasaran					
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Umum		100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Renstra ini disusun sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada tahun 2024, serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan utama Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan juga Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah, berdasarkan hasil dari analisa terdapat 2 risiko utama yang dapat muncul yaitu :

1. Dokumen Perencanaan belum sesuai dengan regulasi baik substansi maupun tahapan proses;
2. Program belum sepenuhnya selaras dengan prioritas daerah dan nasional.

Kedua risiko di atas tentu berdampak pada hasil dokumen perencanaan kurang berkualitas serta pelaksanaan program Pembangunan daerah yang tidak terdukung oleh prioritas nasional. Untuk itu dibutuhkan mitigasi berupa rencana tindak pengendalian antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM Perencana;
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan juga antar Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Menindak lanjuti hasil evaluasi dan *review* dokumen perencanaan;
4. Peningkatan koordinasi horizontal dengan OPD ampunan pelaksana urusan pembangunan daerah dan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat.



Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara dan seluruh Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, maupun dasar dari Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025 - 2026. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 97827

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : **100.3.4.4/XLVIII/KPTS/MU/2024**

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025-2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah berakhirnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 / Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 581, 2020);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419, 2021);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 2);
 29. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026.
- Kedua : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026, jika terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Maluku Utara
Selaku Pengguna Anggaran

ABUBAKAR H. ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP. 19730524 200212 1 002

Tembusan diberikan kepada :

- Yth.
1. Gubernur Maluku Utara;
 2. Inspektur Provinsi Maluku Utara;
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
 5. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara;
 6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara;
 7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Utara;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
 9. Kepala Biro Ekonomi Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara;
 10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara;
 11. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara;
 12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara;
 13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara;
 14. Yang Bersangkutan Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 97827

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 100.3.3.4/XIII/KPTS/MU/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025-2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 / Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 581, 2020);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419, 2021);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 2);
29. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara bertugas menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 / Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 5 Maret 2024

Sekretaris Daerah
Provinsi Maluku Utara
Selaku Pengguna Anggaran

DRS. SAMSUDDIN ABDUL KADIR, M.SI

Pembina Utama
NIP. 19701012 199101 1 003

Tembusan diberikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara;
 2. Inspektur Provinsi Maluku Utara;

3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangaunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara;
7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Utara;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara;
9. Kepala Biro Ekonomi Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara;
11. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara;
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara;
14. Yang Bersangkutan Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : **100.3.3.4/XIII/KPTS/MU/2024**
TENTANG : **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2026**
TANGGAL : **5 Maret 2024**

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025-2026**

No	Nama / Jabatan / SKPD	NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. Samsudin Abdul Kadir, M.Si / Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara / Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	197010121991011003	Pembina Utama / IV.e	Pengarah
2	Rahwan K. Suamba, S.S / Kepala Biro Administrasi Pimpinan / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	197412302003121003	Pembina / IV.a	Penanggung Jawab
3	Hariyanto Ishak, S.H / Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	197905022009031001	Pembina / IV.a	Ketua
4	Yakub A. Patty, S.Sos / Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja / Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara	197104102003121006	Pembina / IV.a	Wakil Ketua
5	Suhaieda Amin, S.T / Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	198303042008032003	Pembina / IV.a	Sekretaris

6	Yusri Paji Wara, S.Sos / Analis Rencana Program dan Kegiatan / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	196709022009031001	Penata Tk. I / III.d	Anggota
7	Ruzia, S.E / Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	198109302009032001	Penata Tk. I / III.d	Anggota
8	Nurul Hikmah, S.E / Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	198311032015012001	Penata Muda / III.a	Anggota
9	Nur Aisyah H.A. Mubin / Pengadministrasi Umum / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	198008212006042012	Pengatur Tk. I / II.d	Anggota
10	Moch. Dzulfikar Adam, A.Md. Kom / Pengelola Kepegawaian / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	199304102020121001	Pengatur / II.c	Anggota
11	Guntur Pramasatya, S.T / Pranata Komputer / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara	199112252023211017	IX	Anggota
12	Sugeng Harijanto, S.Ip / Kepala Bagian Tata Laksana / Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara	197201181993031004	Penata Tk. I / III.d	Anggota
13	Sardi Johar / Analis Kebijakan Ahli Muda / Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara	198207132001011003	Penata / III.c	Anggota
14	Ilham, S.STP / Analis Kebijakan Ahli Muda / Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Utara	199108252014061001	Penata / III.c	Anggota
15	Abdul Hayat Ode Ani / Staf Bantuan Hukum / Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara	197905292007011007	Penata Muda / III.a	Anggota

16	Mutia Rendani, S.E / Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Biro Ekonomi Setda Provinsi Maluku Utara	198306192009032001	Penata / III.c	Anggota
17	Sahwi Arsyad, S.Pdi / Analis Perencana Anggaran / Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara	198006282007011011	Penata Tk. I / III.d	Anggota
18	Irfandi Rusdi, S.E, M.M / Perencana Ahli Muda / Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara	198509212005011002	Penata Tk. I / III.d	Anggota
19	Kaharuddin Hi. Abdurrazak, S.E / Penyusun Naskah / Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara	198702192011011002	Penata / III.c	Anggota
20	Nazaruddin, S.T / Analis Aset Daerah / Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara	198301242010011009	Penata Tk. I / III.d	Anggota

Sekretaris Daerah
Provinsi Maluku Utara
Selaku Pengguna Anggaran

DRS. SAMSUDDIN ABDUL KADIR, M.SI
Pembina Utama
NIP. 197010121991011003